



PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025



**RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311
Telp/Fax. (0287) 381570 Email: bappeda@kebumenkab.go.id
Website: bappeda.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.72.4 / 1921 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk memastikan kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan tahunan daerah, perlu dilakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. menilai kesesuaian sistematika dan kelengkapan substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen.

pada tanggal : 3 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



BAHRUDIN MUNAWIR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 900.724 / 1921 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA
 KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA VERIFIKATOR
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	a. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Yunita Prasetyani, S.E., MA., M.Ec.Dev
		b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	b. Cahyo Ngadmanto, S.H.
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	b. Agus Setyawan, S.E., M.E.
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krma Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Madya	b. Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krma Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Madya	b. Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.

1	2	3	4
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	b. Agus Setyawan, S.E., M.E.
8.	Dinas Tenaga Kerja	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
9.	Dinas Pertanian dan Pangan	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Madya	b. Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd
10.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Madya	b. Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd

1	2	3	4
14.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
15.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
18.	Sekretariat Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Yunita Prasetyani, S.E., MA., M.Ec.Dev
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
19.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Yunita Prasetyani, S.E., MA., M.Ec.Dev
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
20.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.

1	2	3	4
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
23.	Inspektorat Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Yunita Prasetyani, S.E., MA., M.Ec.Dev
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 000.7.2.4 / 1921 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA
 KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
 RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JABATAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Ayah	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
2.	Buayan	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
3.	Puring	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
4.	Petanahan	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
5.	Klirong	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.

1	2	3	4
6.	Buluspesantren	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
7.	Ambal	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
8.	Mirit	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
9.	Bonorowo	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
10.	Prebun	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
11.	Padureso	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
12.	Kutowinangun	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Tauhid, S.E.
13.	Alian	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Tauhid, S.E.

1	2	3	4
14.	Poncowarno	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Taukhid, S.E.
15.	Kebumen	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Taukhid, S.E.
16.	Pejagoan	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
17.	Sruweng	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
18.	Adimulyo	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
19.	Kuwarasan	a. Perencana Ahli Muda	a. Eka Idham I.I.P.K. Lewa, S.T., M.M.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
20.	Rowokele	a. Perencana Ahli Muda	a. Eka Idham I.I.P.K. Lewa, S.T., M.M.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
21.	Sempor	a. Perencana Ahli Muda	a. Eka Idham I.I.P.K. Lewa, S.T., M.M.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.

1	2	3	4
22.	Gombong	a. Perencana Ahli Muda	a. Eka Idham I.I.P.K. Lewa, S.T., M.M.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
23.	Karanganyar	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
24.	Karanggayam	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
25.	Sadang	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Taukhid, S.E.
26.	Karangsambung	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analisis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



BALURUN MUNAWIR

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK Perangkat Daerah dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kelola, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian/review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2023) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKjIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2024).
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD); dengan menyajikan tabel T-C.31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	

1. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (diambil dari hasil

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan usulan Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (misal Disdukcapil tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,
 - Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memuat pendahuluan, visi dan misi, kebijakan untuk mengatasi permasalahan serta program dan kegiatan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 telah dibahas pada Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tanggal 20 Februari 2024 yang masing-masing diikuti oleh para delegasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta instansi terkait lainnya.

Sangat disadari bahwa Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena tidak semua aspirasi/usulan yang tidak dapat terakomodir dalam rencana kerja ini, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja di masa mendatang sangat kami harapkan dari semua pihak.

Kebumen, Agustus 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19740529 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Landasan Hukum.....	5
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	13
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	13
B. Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen.....	27
C. Capaian Keuangan.....	30
D. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	35
E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	37
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	47
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	47
B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	48
C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	50
D. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	55
BAB V PENUTUP.....	122
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	13
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kebumen	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	28
Tabel 2.4	Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	31
Tabel 2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	34
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	38
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	47
Tabel 3.1	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BPKPD Tahun 2021-2026	52
Tabel 4.1	Program Prioritas BPKPD Kabupaten Kebumen yang Mendukung Prioritas Kabupaten	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selanjutnya disingkat Renja BPKPD Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026. Renja BPKPD tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah BPKPD;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2025 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down*, dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BPKPD Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi BPKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi penunjang keuangan.

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator tujuan yaitu Nilai SAKIP 74.00 pada Tahun 2025 dan predikat WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2025 serta dengan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan target Indikator Sasaran yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 sebesar 15,74% sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BPKPD tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
 23. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025; dan
 25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Renja BPKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Renja BPKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Renja BPKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJiP.

B. Analisis Kinerja

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan :

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU OPD);

2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2025)

C. Capaian Kinerja

Memuat perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024) yang mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti standar pelayanan minimal SDGs;
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayananan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Sub-bab ini memuat uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Penetapan RKPD)

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub-bab ini memuat tentang hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM. asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Kebumen.

C. Program dan Kegiatan

1. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN Berisikan dokumen pendukung berupa :

1. Berita Acara Forum Organisasi Perangkat Daerah
2. Notula Forum Organisasi Perangkat Daerah
3. Daftar Hadir Forum Organisasi Perangkat Daerah
4. Foto Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2025. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	681.849.851.000
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.013.554.000
	a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.000.000
	b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.554.000
	c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300.000.000
	d. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000
	e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	70.000.000
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.366.000
	a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	193.683.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	118.000.000
	c. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.683.000
	d. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200.000.000
3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	551.366.000
	a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110.000.000
	b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.683.000
	c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	133.683.000
	d. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	170.000.000
	e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.000.000
4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	679.659.565.000
	a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	730.000.000
	b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	663.901.079.000
	c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.235.728.000
	d. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.792.758.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.721.168.000
5.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000
	a. Penyusunan Standar Harga	85.000.000
	b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	121.436.000
	c. Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000
	d. Pengamanan Barang Milik Daerah	683.554.000
	e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.178.000
	f. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	110.000.000
	g. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.000.000
	h. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.117.837.000
6.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.117.837.000
	a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.066.070.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.000.000
	c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	245.265.000
	d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	130.000.000
	e. Penetapan Wajib Pajak Daerah	411.049.000
	f. Penagihan Pajak Daerah	3.160.453.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		21.045.103.000
7.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.366.000
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.366.000
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
8.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.479.547.000
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.282.198.000
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.349.000
9.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.724.000
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196.724.000
10.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.554.000
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.000.000
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000
	e. Penyediaan Bahan/Material	75.000.000
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.554.000
11.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3.845.312.000
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.596.112.000
	b. Pengadaan Mebel	16.000.000
	c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.200.000
12.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.600.000
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	298.000.000
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.600.000
13.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.000.000
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.000.000
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000
JUMLAH		709.733.959.000

Untuk capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2023 dan realisasi Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	12	12	12	100	12	36	60
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan peraturang dan perundang-undangan	15	3	3	3	100	3	9	60
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	60	12	12	12	100	12	36	60
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	120	120	120	100	120	360	60
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	4	4	4	100	4	12	60
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/S eminar	5	1	1	1	100	0	2	40
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Workshop dan Seminar	221	55	55	55	100	10	120	54.29
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	40	8	8	8	100	8	24	60
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun. Jumlah orang THL yang terbayar	40	8	8	8	100	8	24	60
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun. Jumlah Rakorpop	20	4	4	4	100	4	12	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang mendapat gaji dan tunjangan. jumlah ASN yang menerima Tamsil	60	12	12	12	100	12	36	60
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	60	12	12	12	100	12	36	60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	315	271	52	59	113	31	302	95,87
	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2	303	257	10	17	170	10	284	93.73
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan mebeleur	41	10	8	8	100	2	20	48.78
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin lainnya gedung kantor	21	4	34	34	100	19	57	271
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana	10	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	12	100	12	36	60
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	577	105	118	118	100	118	341	59.10
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	220	44	44	44	100	44	132	60
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Terpelihara	242	50	48	48	100	48	146	60
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan	301	60	60	60	100	60	180	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		perbaikan peralatan kerja								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10	2	2	2	100	2	6	60
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	63	63	63	63	100	63	63	100
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	315	63	63	63	100	63	189	60
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	11	3	2	2	100	2	7	63.63
		Penatausahaan Barang Miik Daerah	11	3	2	2	100	2	7	63.63
		Pengamanan Barang Miik Daerah	580	156	156	156	100	156	468	80.69
		Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11	3	2	2	100	2	7	63.63
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10	2	2	2	100	2	6	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	10	2	2	2	100	2	6	60
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	1	3	60
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen penganggaran dan regulasi	50	10	10	10	100	10	30	60
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	20	4	4	4	100	4	12	60
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	10	2	2	2	100	2	6	40
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanda dan Perbup SHSD/ Standar Satuan Harga	10	2	2	2	100	2	6	60
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25	5	5	5	100	5	15	60
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	10	2	2	2	100	2	6	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	20	4	4	4	100	4	12	60
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan penerimaan dan pengeluaran dana perimbangan daerah	50	10	10	10	100	10	30	60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan / Belanja transfer	45	9	9	9	100	9	27	60
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji	210	52	52	52	100	52	156	74,29
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	10	2	2	2	100	2	6	60
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah dan terlaksananya rakor/pembinaan akuntansi keuangan Daerah	6785	1357	1357	1357	100	1357	4071	60
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban	6775	1355	1355	1355	100	1355	4065	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Semesteran	fungsiional OPD jumlah SP2B BLUD. SP2B BOS yang disahkan dan jumlah laporan realisasi APBD Semester I								
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaann rekon dalm rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD. BLUD dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15	3	3	3	100	3	9	60
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPD. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	2	6	60
	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Bimtek Akuntansi	5	1	1	1	100	1	3	60
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD	5	1	1	1	100	1	3	60
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah paket kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	10	2	2	2	100	2	6	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah nasabah yang mendapatkan subsidi bunga melalui lembaga	5000	1000	0	0	0	0	1000	20
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) Jumlah Desa yang mendapat alokasi Dana Desa (DD), BKK, TPQ	2245	449	449	449	100	449	1347	60
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah penyediaan belanja tidak terduga	5	1	1	0	0	1	2	40
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa yang mendapatkan alokasi bagi hasil retribusi daerah (BHRD)	2245	449	449	449	100	449	1347	60
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	102.59%	100%	101.54%	101.54	100%	100%	100
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	11	11	11	11	100	11	11	100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Jumlah OPD yang termonitor dan terevaluasi	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	100	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya Jumlah Unit Kerja yang termonitoe dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya								
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi keberatan	26 Kec	26 Kec	26 Kec	26 Kec	100	26 Kec	26 Kec	100
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah basis data objek pajak daerah	1.365.632	1.356.791	1.359.505	1.359.505	100	1.361.544	1.361.544	99.70
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OPD Pengelola Pendapatan	80	80	80	80	100	80	80	100
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak daerah	1.362.938	1.362.938	1.356.823	1.356.823	100	1.358.858	1.358.858	99.70
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang tertagih	1.362.938	1.362.938	1.356.823	1.356.823	100	1.358.858	1.358.858	99.70

Mendasari data yang disajikan pada Tabel 2.2 diatas seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah seluruhnya dapat tercapai dengan optimal, hal tersebut menandakan bahwa seluruh program dan kegiatan BPKPD dapat terlaksana dengan efisien dan efektif guna mendukung pencapaian indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

B. Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan kali kedelapan dan 7 tahun berturut-berturut Kabupaten Kebumen meraih Opini WTP yaitu Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Dengan penilaian Opini WTP ini maka target IKU Kabupaten Kebumen berdasarkan RPJMD atau RKPD Tahun 2023 telah tercapai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indikator Tujuan :											
1	Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	67	69	71	74	66.11	66.11*	74	77	Belum Tercapai
2	Opini BPK		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
	Indikator Sasaran:											
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	14.48%	15.13%	15.40%	15.74%	15.98%	15.98%*	15.74%	15.63%	Tercapai

*=data tahun lalu

Untuk mempertahankan capaian tersebut sampai dengan akhir target RPJMD, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen semua Aparat Sipil Negara dan *stakeholder*/pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- c. Perbaiki yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. Tertib penyampaian laporan keuangan;
- e. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- f. Tertib pengelolaan Pendapatan Daerah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Target capaian pendapatan asli daerah di Kabupaten Kebumen pada setiap tahunnya senantiasa tercapai, di mana pada tahun 2023 lalu capaian realisasi PAD mencapai Rp463.650.961.705 dari target sebesar Rp432.821.047.000 atau 107,12% dari target, dari total capaian tersebut pendapatan pajak daerah meningkat sebesar Rp7.378.830.180,- atau tumbuh sebesar 5,68% dari tahun sebelumnya.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Semangat untuk meningkatkan *local taxing power* di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan sinergi dengan Pemerintah Pusat guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penunjang keuangan.

Dalam melaksanakan fungsinya, badan mengacu pada visi Kabupaten Kebumen yaitu Menuju Kabupaten Kebumen yang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang baik dan benar.

BPKPD Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Badan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Capaian Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Realisasi anggaran dan belanja dari 4 program, 13 kegiatan, dan 53 sub kegiatan sebagaimana pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		681.849.851.000	680.403.549.041	99,79
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.013.554.000	1.007.171.206	99,37
	a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.000.000	169.188.100	99,52
	b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.554.000	319.317.849	98,69
	c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300.000.000	299.625.960	99,88
	d. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000	149.534.876	99,69
	e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	70.000.000	69.504.421	99,29
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.366.000	602.701.332	96,38
	a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	193.683.000	190.046.300	98,12
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	118.000.000	115.226.000	97,65
	c. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.683.000	105.293.037	92,62
	d. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200.000.000	192.135.995	96,07
3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	551.366.000	544.662.729	98,78
	a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110.000.000	109.861.850	99,87
	b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.683.000	112.797.000	99,22
	c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	133.683.000	132.486.916	99,11

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	%
	APBD Kabupaten/Kota			
	d. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	170.000.000	23.182.400	13,64
	e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.000.000	166.334.563	693,06
4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	679.659.565.000	678.249.013.774	99,79
	a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	730.000.000	730.000.000	100,00
	b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	663.901.079.000	663.434.008.508	99,93
	c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.235.728.000	341.838.385	27,66
	d. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.792.758.000	13.743.166.881	99,64
5.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000	1.696.729.074	98,58
	a. Penyusunan Standar Harga	85.000.000	83.908.500	98,72
	b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	121.436.000	118.370.641	97,48
	c. Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000	324.199.000	98,24
	d. Pengamanan Barang Milik Daerah	683.554.000	678.731.911	99,29
	e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.178.000	107.526.550	76,16
	f. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	110.000.000	161.574.172	146,89
	g. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.000.000	84.449.000	51,18
	h. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85.000.000	137.969.300	162,32
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		5.117.837.000	5.067.031.269	99,01
6.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.117.837.000	5.067.031.269	99,01
	a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.066.070.000	1.037.414.332	97,31
	b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.000.000	103.497.450	98,57
	c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	245.265.000	240.475.837	98,05
	d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	130.000.000	129.809.721	99,85
	e. Penetapan Wajib Pajak Daerah	411.049.000	396.259.129	96,40
	f. Penagihan Pajak Daerah	3.160.453.000	3.159.574.800	99,97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		21.045.103.000	20.063.419.760	95,34
7.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.366.000	115.998.300	98,83
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.366.000	76.979.000	99,50
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	39.019.300	97,55
8.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.479.547.000	14.553.827.524	94,02
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.282.198.000	14.360.256.356	93,97
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.349.000	193.571.168	98,09

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	%
9.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.724.000	193.483.993	98,35
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196.724.000	193.483.993	98,35
10.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.554.000	407.274.392	98,01
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000	15.970.800	99,82
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	102.011.380	97,15
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.000.000	37.942.200	92,54
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.990.000	99,92
e.	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000	73.636.000	98,18
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000	137.651.212	99,75
g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.554.000	28.072.800	98,31
11.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.596.112.000	3.584.269.500	99,67
b.	Pengadaan Mebel	16.000.000	16.000.000	100,00
c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.200.000	232.565.000	99,73
12.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.600.000	440.041.564	93,91
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.929.500	98,24
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	298.000.000	269.823.064	90,54
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.600.000	166.289.000	99,81
13.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.000.000	519.959.487	99,61
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.000.000	235.553.487	99,39
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	79.445.500	99,31
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	204.960.500	99,98
JUMLAH		709.733.959.000	707.230.729.144	99,65

Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran sejumlah Rp709.733.959.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sejumlah Rp27.179.536.000,00, belanja modal sejumlah Rp3.845.312.000,00, belanja tidak terduga Rp1.235.728.000,00, dan Belanja transfer Rp677.473.383.000,00 untuk melaksanakan 4 program, 13 kegiatan, dan 53 sub kegiatan (anggaran setelah perubahan).

Realisasi total belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp707.192.759.688.00 atau 99.64% dari total anggaran Rp709.733.959.000.00. Realisasi belanja operasi sebesar Rp26.043.543.184.00 atau 95.82% dari

jumlah anggaran belanja operasi Rp27.179.536.000.00. Realisasi belanja modal sebesar Rp3.832.834.500.00 atau 99.68% dari jumlah anggaran belanja modal Rp3.845.312.000.00. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp341.838.385.00 atau 27.66% dari jumlah anggaran belanja tidak terduga Rp1.235.728.000.00. Realisasi belanja transfer sebesar Rp676.974.543.619.00 atau 99.93% dari jumlah anggaran belanja transfer sebesar Rp677.473.383.000.00. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	BELANJA OPERASI	27.179.536.000	26.043.543.184	95.82
	Belanja Pegawai	15.373.656.000	14.448.711.016	93.98
	Belanja Barang dan Jasa	11.075.880.000	10.919.175.766	98.59
	Belanja Subsidi	730.000.000	675.656.402	92.56
2.	BELANJA MODAL	3.845.312.000	3.832.834.500	99.68
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.235.728.000	341.838.385	27.66
4.	BELANJA TRANSFER	677.473.383.000	676.974.543.619	99.93
	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	13.743.166.881	99.64
	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000	663.231.376.738	99.93
	JUMLAH	709.733.959.000	707.192.759.688	99.64

Realisasi belanja operasi hanya mencapai 95.82% karena belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta honorarium, terealisasi tidak sesuai yang dianggarkan disebabkan karena terdapat pegawai yang mengalami mutasi, purna tugas, dan meninggal dunia selain itu juga terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa. Belanja Modal terealisasi 99.68% dan sisanya merupakan sisa tender. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 27.66% karena bersifat penyediaan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai 99.93%.

Secara rinci realisasi anggaran belanja langsung yang realisasinya dibawah 90% antara lain program kegiatan: Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pagu Anggaran sebesar Rp1.235.728.000.00 terealisasi sebesar Rp341.838.385.00 atau 27.66% dikarenakan pos anggaran tersebut bersifat penyediaan manakala dibutuhkan.

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dewasa ini kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen pada umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut meliputi :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan dan yang menangani pengelolaan keuangan cukup memadai;
- b. Koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan;
- c. Adanya komitmen pengelola keuangan sehingga realisasi keuangan kegiatan dapat mencapai target yang telah direncanakan;
- d. Komitmen semua ASN dan *stakeholder*/pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- g. Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan. melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur. khususnya aparatur pengelola keuangan. maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset:
 - 1) Mengadakan pelatihan/Bimtek mengenai pengelola keuangan pada SKPD;
 - 2) Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 3) Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - 4) Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait; dan
 - 5) Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- h. Tertib penyampaian Laporan Keuangan;
- i. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- j. Menerapkan mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT);
- k. Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI dengan penerapan SIPD-RI dari Penganggaran. Penatausahaan sampai dengan akuntansi pelaporan, e-BMD, Sidat Kedaton, SimGaji, SIPPAS, SIPATMA SP2D Online, Simbankeu, dan SIBUBA;
- l. Mengoptimalkan fungsi PPK SKPD guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan;
- m. Menindaklanjuti segera rekomendasi BPK dengan melibatkan OPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat;
- n. Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- o. Pelayanan Pajak Daerah berbasis IT melalui E-Tax, E-BPHTB, SIPBB, Sikopat, dan Sidamen; dan
- p. Mudah nya membayar pajak daerah kapan saja dan di mana saja melalui beberapa *channel* pembayaran pajak daerah seperti Bank Jateng (Teller, ATM, *i-Banking*), Tokopedia, Gojek, Indomaret, OVO, LinkAja, Shoppe Pay, Dana; maupun Kantor Pos.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada Tahun 2025. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan pada Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah dicapai tersebut. masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilaksanakan dalam mencapai RPJMD 2021-2026.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalani tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

- 1. Terbatasnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia;
- 2. Penerapan aplikasi SIPD-RI yang belum sepenuhnya optimal;
- 3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi;
- 4. Perubahan peraturan dan tingkat pusat yang sangat dinamis; dan
- 5. Terbatasnya perekonomian daerah yang berdampak pada PAD pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan terkait dengan peluang dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

- 1. Adanya dukungan dan komitmen dari kepala daerah maupun pimpinan perangkat daerah

2. Adanya peraturan dan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup memnantu dalam pengelolaan administrasi keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. Kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan anggaran guna menjamin akuntabilitas administrasi keuangan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja yang telah diuraikan di depan. maka isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah yang masih rendah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah;
2. Indeks Kapasitas fiskal daerah yang masih rendah. sehingga mempengaruhi beberapa sektor khususnya infrastruktur;
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi daerah;
4. Perlu adanya konsistensi menyeluruh tentang pengelolaan aset yang baik dan benar; dan
5. Masih diperlukannya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengaplikasian SIPD-RI.

E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki. perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Adapun review Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21.823.997.185	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	27.648.799.935	
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	161.264.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	127.887.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun . jumlah orang THL yang terbayar	8 Dokumen	131.264.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun . jumlah orang THL yang terbayar	4 Dokumen	97.887.000	Penyesuaian Anggaran
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	Sesuai
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	16.629.436.935	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	16.553.740.935	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	80 Orang/bulan	16.409.436.935	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	80 Orang/bulan	16.409.436.935	Sesuai
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.304.000	Penyesuaian Anggaran
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar	-	80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar	-	70.000.000	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	BPKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Workshop/S eminar	76 Orang	80.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	BPKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Workshop/S eminar	76 Orang	70.000.000	Penyesuaian Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	351.500.000.00	Administrasi Umum Daerah	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	351.500.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	10.000.000	Sesuai
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Paket	110.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Paket	110.000.000	Sesuai
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	30.000.000	Sesuai
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	3.500.000	Sesuai
10	Penyediaan Bahan/Material	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material	1 Paket	60.000.000	Penyediaan bahan/material	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material	1 Paket	60.000.000	Sesuai
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	138.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	138.000.000	Sesuai
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen		
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	3.454.108.250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	9.517.000.000	
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	9 Unit	3.384.108.250	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	28 Unit	9.447.000.000	Penyesuaian Anggaran
14	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Unit Mebel	2 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Unit Mebel	2 Unit	10.000.000	Sesuai
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	60.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	60.000.000	Sesuai
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa	-	634.688.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa	-	515.672.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
			Penunjang Urusan Pemerintahan			Pemerintahan		Penunjang Urusan Pemerintahan			
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	Sesuai
17	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	310.000.000	Penyesuaian Anggaran
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	330.688.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	201.672.000	Penyesuaian Anggaran
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	513.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	513.000.000	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	-	260.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	-	260.000.000	Sesuai
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	50 Unit	53.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	50 Unit	53.000.000	Sesuai
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	200.000.000	Sesuai
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	685.114.388.330	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	696.541.436.400	
IX	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	-	1.015.632.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	-	990.600.000	
22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	2 Dokumen	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	2 Dokumen	180.000.000	Sesuai
23	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	2 Dokumen	325.632.000	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	2 Dokumen	300.600.000	Penyesuaian Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
						tentang Penjabaran APBD					
24	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanda	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	1 Dokumen	150.000.000	Sesuai
25	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	60.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	60.000.000	Sesuai
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.000.000	Sesuai
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	-	596.264.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	-	534.000.000	
27	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah	10 Dokumen	201.632.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah	10 Dokumen	174.000.000	Penyesuaian Anggaran
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer	50 Laporan	94.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer	50 Laporan	94.000.000	Sesuai
29	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait		Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji	12 Dokumen	125.632.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	BPKPD	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji	12 Dokumen	96.000.000	Penyesuaian Anggaran
30	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	BPKPD	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	2 Dokumen	175.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan	BPKPD	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	2 Dokumen	170.000.000	Penyesuaian Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)					
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	-	549.039.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	-	497.775.000	
31	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD. Jumlah SP2B BLUD. SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semesteran	1355 Laporan	94.685.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD. Jumlah SP2B BLUD. SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semesteran	1355 Laporan	94.685.000	Sesuai
32	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah pelaksanaan rekon dalam rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD. BLUD dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	126.722.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah pelaksanaan rekon dalam rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD. BLUD dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	101.090.000	Penyesuaian Anggaran
33	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Dokumen LKPD. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	2 Dokumen	155.632.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Dokumen LKPD. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	2 Dokumen	130.000.000	Penyesuaian Anggaran
34	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Kegiatan Bimtek Akuntansi	53 Orang	160.000.000	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	BPKPD	Jumlah Kegiatan Bimtek Akuntansi	53 Orang	160.000.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
						Kabupaten/Kota					
36	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD	37 Lembaga	12.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD	37 Lembaga	12.000.000	Sesuai
XII	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	682.953.453.330	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	694.519.061.400	
37	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Bantuan Desa Tematik Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD). BKK.TPQ. dan Pilkades -Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	449 Laporan	663.993.609.330	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Bantuan Desa Tematik Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD). BKK.TPQ. dan Pilkades -Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	449 Laporan	675.559.217.400	Penyesuaian Anggaran
38	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	2 Laporan	2.000.000.000		BPKPD	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	2 Laporan	2.000.000.000	Sesuai
39	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	449 Desa	16.959.844.000		BPKPD	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	449 Desa	16.959.844.000	Sesuai
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.276.216.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.122.424.000	
XIII	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang	83 Dokumen	1.276.216.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang	83 Dokumen	1.122.424.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
			Milik Daerah					Milik Daerah			
40	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga	1 Dokumen	85.000.000	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga	1 Dokumen	85.000.000	Sesuai
41	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	186.896.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	110.000.000	Penyesuaian Anggaran
42	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan	2 Laporan	110.492.000	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan	2 Laporan	110.492.000	Sesuai
43	Pengamanan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah unit barang milik daerah yang difasilitasi pengamannya (sertifikat. plang. asuransi)	1 Laporan	400.000.000	Pengamanan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah unit barang milik daerah yang difasilitasi pengamannya (sertifikat. plang. asuransi)	1 Laporan	400.000.000	Sesuai
44	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah jenis dokumen Penggunaa. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	226.896.000	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah jenis dokumen Penggunaa. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	150.000.000	Penyesuaian Anggaran
45	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMD	2 Laporan	90.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMD	2 Laporan	90.000.000	Sesuai
46	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	2 Laporan	125.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	2 Laporan	125.000.000	Sesuai
47	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD	40 orang	51.932.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD	40 orang	51.932.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	-	5.975.891.670	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	-	5.689.515.000	
XIV	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	5.975.891.670	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	5.689.515.000	
48	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya	2 Dokumen	1.125.632.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya	2 Dokumen	1.100.000.000	Penyesuaian Anggaran
49	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi dan keberatan	26 Laporan	105.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi dan keberatan	26 Laporan	105.000.000	Sesuai
50	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah basis data objek pajak daerah	1.363.586 Laporan	304.424.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah basis data objek pajak daerah	1.363.586 Laporan	120.576.000	Penyesuaian Anggaran
51	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah OPD Pengelola Pendapatan	80 Laporan	120.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah OPD Pengelola Pendapatan	80 Laporan	120.000.000	Sesuai
52	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	1.360.897 Dokumen	460.835.670	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	1.360.897 Dokumen	383.939.000	Penyesuaian Anggaran
53	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah wajib pajak yang tertagih	1.360.897 Dokumen	3.860.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah wajib pajak yang tertagih	1.360.897 Dokumen	3.860.000.000	Sesuai
JUMLAH TOTAL					714.190.493.185	JUMLAH TOTAL					731.002.175.335

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada BPKPD Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan. dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Rincian usulan kegiatan yang masuk dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah/Kegiatan Penunjang Urusan/Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan RKP Tahun transisi antara RPJPN Tahun 2005-2025 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sekaligus penjabaran awal Rancangan Undang-Undang RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan 5 tahunan. “Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagai negara nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. RKP Tahun 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, untuk mencapai tujuan pembangunan tahun 2025 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Mendasari prioritas pembangunan nasional diatas BPKPD Kabupaten Kebumen mendukung Prioritas Nasional 7 yaitu mendukung Penguatan Fondasi Keuangan Daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah.

Sementara itu Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2025 diarahkan pada tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter” yang dijabarkan dalam Prioritas Daerah Tahun 2025. Adapun Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada :

1. Peningkatan Kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025. tema pembangunan tahun 2025 adalah “Peningkatan Sektor Pertanian. Industri. dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia ”. Prioritas pembangunan tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
 - b. Penerapan merit sistem dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
 - c. Optimalisasi pengendalian pembangunan. pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
 - d. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta

- e. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif. dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta kesehatan ibu dan anak;
 - c. Peningkatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka pencapaian SPM Kesehatan;
 - d. Peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan;
 - e. Dukungan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yaitu Wajib Belajar 13 Tahun pada 1 tahun usia pra sekolah serta pendidikan kesetaraan dengan fokus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar sebagai ujung tombak penanganan anak tidak sekolah;
 - f. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan;
 - g. Penguatan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti; serta
 - h. Peningkatan pengarusutamaan *gender* serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. dilakukan melalui upaya:
 - a. pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
 - b. peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
 - c. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
 - d. pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
 - e. peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;

- f. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - g. peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan;
 - h. peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan; serta
 - i. peningkatan perlindungan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal.
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. dilakukan melalui upaya:
- a. pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
 - b. optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
 - c. pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
 - d. peningkatan Upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
 - e. penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah. kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat. dilakukan melalui upaya:
- a. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
 - b. peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;
 - c. penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
 - d. pengembangan dan pelestarian budaya daerah

C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BPKPD Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan sehingga program kegiatan di BPKPD mendukung Misi 1 Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Dengan jalan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan BPKPD, tujuan dan sasaran rencana kerja BPKPD tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BPKPD Tahun 2021-2026

No	Bidang/Urusan /Indikator	Satuan	Data Awal		Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indikator Tujuan Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel a. Nilai SAKIP b. Opini BPK (WTP/WDP)	Nilai WTP/WDP	63.85	64.00	67.00	69.00	71.00	74.00	77.00
			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indikator Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	14.59	12.88	14.88	15.13	15.40	15.74	15.63

D. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Rencana kerja BPKPD Tahun 2025 mencakup 4 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang terkait program. dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2) Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran
- 5) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemutungan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- 3) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah

- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Penyusunan Standar Harga
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 6) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 7) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

- 8) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 4) Pengolahan. Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 5) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 6) Penagihan Pajak Daerah

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi. misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas Pendanaan di BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memperhatikan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 diantaranya adalah :

Tabel 4.1
Program Prioritas BPKPD Kabupaten Kebumen
Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Prakiraan Maju 2026	
			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	696.541.436.400	100 %	656.650.000.000
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	63 Dokumen	1.122.424.000	63 Dokumen	1.293.000.000
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	5.689.515.000	100%	1.615.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	27.648.889.935	100%	22.356.000.000
TOTAL				714.190.493.185		731.002.265.335

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						731.002.175.335.00							681.914.000.000.00		
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						731.002.175.335.00								681.914.000.000.00	
	5	02			KEUANGAN						731.002.175.335.00								681.914.000.000.00	
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	27.648.799.935.00						-	22.356.000.000.00		
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			8 Dokumen	127.887.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan	-	-	95.000.000.00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas					
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen Dokumen	97.887.000.00	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan	-		60.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publik yang berkualitas					
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	30.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		35.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.553.740.935.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	17.140.000.000.00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	16.409.436.935.00	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		16.900.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.0 00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	144.304.000.00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		240.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				76 Orang	70.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		105.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	110.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		115.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.0 00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		40.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138.000.000.00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		145.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		12.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.0 00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	60.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	201.672.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		340.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	513.000.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	455.000.000.00	
	5 02 01 2.0 9 00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	53.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		55.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.0 00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		100.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-		-	696.541.436.400.00						-	656.650.000.000.00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	180.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		190.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	300.600.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		320.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	300.000.000.00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		320.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	150.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		160.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00 1 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	60.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		65.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				10 Dokumen	174.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		180.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas.				50 Laporan	94.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		98.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)													
	5	02	02	2.0	00	09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	96.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		105.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	170.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		185.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-		-	497.775.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	527.000.000.00	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1355 Laporan	94.685.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		97.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	101.090.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		105.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02 2.0 00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	130.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		140.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00 3 11	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota				53 Orang	160.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		165.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00	00 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina				37 Lemba ga	12.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		20.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				449 Laporan	675.559.217.400.00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM. DANA DESA	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		635.000.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.0 00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	2.000.000.000.00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		2.000.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 02	2.004	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota				449 Laporan	16.959.844.000.00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		17.500.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	1.122.424.000.00						-	1.293.000.000.00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	110.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		110.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 03 2.0 00 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	110.492.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		115.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 03	2.0 00	00 07													Pengamanan Barang Milik Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	400.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		500.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 03	2.0 00 1 10	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	150.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		200.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 03 2.0 00 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	90.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		95.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 03 2.0 00 1 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	125.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		130.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 03 2.0 00 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota				40 Orang	51.932.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		53.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-		-	5.689.515.000.00						-	1.615.000.000.00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	5.689.515.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	1.615.000.000.00	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				26 Laporan	105.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		105.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 04	2.0 00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1363586 Laporan	120.576.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		250.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 04	2.0 1	00 06	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan . Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				80 Laporan	120.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		145.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 04	2.0 00 08	1													Penetapan Wajib Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1360897 Dokumen	383.939.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		450.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 04	2.0 00 1 11	Penagihan Pajak Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1360897 Dokumen	3.860.000.000.00	Kab. Kebumen . Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		420.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H								731.002.175.335.00							681.914.000.000.00	

BAB V PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya *benefit* yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga *cost-nya*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2025. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari BPKPD. dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPKPD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Kebumen tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati BPKPD Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder BPKPD Kabupaten Kebumen.

Kebumen, Agustus 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Drs. Aden Andri Susilo. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19740529 199303 1 001

BAB V PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya *benefit* yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga *cost*-nya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2025. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari BPKPD, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPKPD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Kebumen tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati BPKPD Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder BPKPD Kabupaten Kebumen.

Kebumen, Agustus 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Drs. Aden Andri Susilo, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19740529 199303 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyanan	
Hantari Mahadevi	

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEBUMEN
TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					731.002.175.335.00						681.914.000.000.00			
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					731.002.175.335.00						681.914.000.000.00			
	5 02				KEUANGAN					731.002.175.335.00						681.914.000.000.00			
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	27.648.799.935.00						-	22.356.000.000.00	
	5	02	01	2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			8 Dokumen	127.887.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	95.000.000.00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	97.887.000.00	Kab. Kebumen. Kebumen	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel	-		60.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				76 Orang	70.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	105.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	351.500.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	390.000.000.00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	15.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	110.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	115.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	40.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.500.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	5.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	60.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	70.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138.000.000.00		Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	145.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	9.517.000.000.00				-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	3.512.000.000.00	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			28 Unit	9.447.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	3.500.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	10.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	12.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	60.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	515.672.000.00	-	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	659.000.000.00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	4.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	4.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	310.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	315.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	201.672.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	340.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	513.000.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	455.000.000.00		
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						0				0 0	260.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	300.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	53.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	55.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	100.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-		-	696.541.436.400.00						-	656.650.000.000.00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-		-	990.600.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	1.055.000.000.00	

5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS												
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	180.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	190.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	300.600.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	320.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD												
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	300.000.000.00	Kab. Kebumen. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	320.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran												

						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	150.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	160.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	60.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	65.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	534.000.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	568.000.000.00		
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				10 Dokumen	174.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	180.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				50 Laporan	94.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	98.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	96.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	105.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	170.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	185.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	497.775.000.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	527.000.000.00	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulanan dan Semesteran													
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulanan dan Semesteran					1355 Laporan	94.685.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	97.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													

						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	101.090.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	105.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	130.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	140.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				53 Orang	160.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	165.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														

						Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				37 Lembaga	12.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	20.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	694.519.061.400.00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	654.500.000.000.00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					449 Laporan	675.559.217.400.00	Kab. Kebumen. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM. DANA DESA	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		635.000.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	2.000.000.000.00	Kab. Kebumen. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	2.000.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				449 Laporan	16.959.844.000.00	Kab. Kebumen. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	17.500.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-		-	1.122.424.000.00						-	1.293.000.000.00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-		-	1.122.424.000.00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	1.293.000.000.00	

5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga												
					Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	85.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	90.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah												
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	110.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	110.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah												
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	110.492.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	115.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah												

						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	400.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	500.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	150.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	200.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	90.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	95.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			2 Laporan	125.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	130.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			40 Orang	51.932.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	53.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
4	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	5.689.515.000.00						-	1.615.000.000.00		
	5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	5.689.515.000.00				-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	1.615.000.000.00	

5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah												
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	1.100.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	245.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				26 Laporan	105.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	105.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1363586 Laporan	120.576.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	250.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah												

						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				80 Laporan	120.000.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	145.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1360897 Dokumen	383.939.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	450.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1360897 Dokumen	3.860.000.000.00	Kab. Kebumen. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. efisien. bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	420.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
										J U M L A H	731.002.175.335.00						681.914.000.000.00		

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 Februari 2024

Pimpinan Sidang

KEPALA BPKPD KABUPATEN KEBUMEN



Dis: ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740529 199303 1 001

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Agus Setyaningrum	Unsur Perangkat Daerah	Bappeda Kabupaten Kebumen	
2.	Amir Maksud	Unsur Kecamatan	Kecamatan Rowokele	
3.	Indrad Pundhono	Unsur Pemerintahan Desa	Desa Logede Kecamatan Pejagoan	
4.	SURONO	Unsur Wajib Pajak	Pizza Hut Kebumen	
5.	Aditya Rahmat S	Unsur Masyarakat/ LSM	Forum Anak Indonesia	

DELEGASI OPD BPKPD PADA FORUM PERANGKAT DAERAH BPKPD
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Anwarulhaq Abd. M. Fauzan	Delegasi BPKPD Kabupaten Kebumen	Universitas Putra Bangsa Kebumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat : Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2025
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Surat Undangan : 000/189
Waktu Sidang/Rapat : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Acara : Forum Perangkat Daerah Tahun 2024

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Sekretaris : Jamal Darwanto, S.E., M.M.
Pencatat : Dedy Prayogi, S.E.

Peserta Sidang/Rapat

1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
4. Terlampir dalam undangan

Kegiatan Sidang/Rapat

: Pagu operasional BPKPD Kabupaten Kebumen secara umum lebih sedikit dibandingkan pagu operasional murni tahun 2024. Hal ini dikarenakan anggaran yang sifatnya pengadaan seperti pengadaan kendaraan dinas belum dimasukkan karena menyesuaikan kebijakan. Belanja jasa P2K tahun 2025 juga belum dimasukkan sebanyak 46 orang.

Proses pengukuran tanah milik daerah sudah selesai dilakukan pada tahun 2024 dan untuk proses sertifikasinya masih berlangsung hingga tahun 2025.

Berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD diketahui rekapitulasi untuk usulan dengan tujuan akhir BPKPD yaitu sebagai berikut.

No.	Indikator/Tujuan Sasaran	Jumlah Usulan	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan	Anggaran
1.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan	15	15	11	Rp 2.490.000.000

	Pemeliharaan Jembatan Desa				
2.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa	137	130	24	Rp 20.607.500.000
3.	Kegiatan Rehabilitasi Lapangan Desa	15	15	11	Rp 1.879.000.000
TOTAL		167	160	46	Rp 24.976.500.000

Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, camat, serta kepala desa yang bersangkutan dimohon untuk mencermati usulan-usulan dari DPRD tersebut serta perihal *cost sharing* yang sebesar 30%.

SESI DISKUSI

1. Universitas Putra Bangsa

Banyak jalan poros desa di Kabupate Kebumen yang kondisinya saat ini kurang baik dan terlihat seperti tidak ada upaya perbaikan selama beberapa tahun sehingga kondisinya semakin rusak. Jalan poros desa memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan upaya perbaikan jalan poros desa agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari.

Tanggapan :

Perbaikan jalan poros desa sudah disampaikan dalam usulan pokok-pokok pikiran DPRD di mana di dalamnya sebagian besar berupa usulan perbaikan jalan poros desa. Namun demikian, tidak semua usulan tersebut dapat terealisasi karena akan dilakukan penyeleksian dari Bappeda.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sebelumnya disampaikan bahwa proses sertifikasi tanah milik daerah akan berlangsung hingga tahun 2025, sehingga mohon untuk disampaikan atau dipaparkan sudah sejauh mana proses sertifikasi tanah tersebut.

Berikutnya mohon untuk disampaikan pula sebaran aset sarana dan prasana pada perangkat daerah supaya dapat diketahui OPD mana yang tingkat kebutuhan sarana dan prasarananya tinggi. Berdasarkan data tersebut, diharapkan

penyebaran aset kepada OPD dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BPKPD diharapkan dapat menyampaikan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target pendapatan supaya OPD yang juga terlibat di dalamnya dapat menentukan langkah akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Tanggapan :

Data sertifikasi tanah milik daerah dan sebaran aset sarana dan prasarana pada perangkat daerah sudah tersedia. Strategi untuk meningkatkan pendapatan yaitu dengan menjaga dan merawat aset-aset yang sudah tersedia dengan baik seperti tempat wisata Pandan Kuning yang belum lama dan mencoba bekerjasama dengan pihak ketiga.

3. Trio Azana Style Hotel

Apakah terdapat perubahan untuk indeks harga tahun 2025 terutama anggaran makan minum? Indeks harga makan minum untuk tahun 2025 diharapkan dapat naik dari tahun 2024.

Tanggapan :

Saat ini pembelian diusahakan melalui e-catalogue, sehingga untuk para pelaku usaha dapat segera registrasi mendaftarkan usahanya di e-catalogue. Pada perkiraan triwulan ketiga nanti akan dikeluarkan standar harga.

4. Forum Anak Indonesia

Apakah anggaran yang telah disampaikan dalam paparan responsif terhadap kebutuhan anak di Kabupaten Kebumen?

Tanggapan :

BPKPD tidak terlibat langsung dengan kesejahteraan anak, namun terlibat dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dinas yang terlibat secara langsung yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Kepala Desa Logede Kecamatan Pejagoan

Pada forum perangkat daerah tahun lalu, Kepala Desa Kawedusan menyampaikan keluhan perihal drainase di desa Kawedusan dan akhirnya dilakukan perbaikan setelahnya. Apakah keluhan-keluhan seperti itu harus disampaikan dalam forum seperti ini agar dapat segera dilaksanakan? Jika menunggu usulan yang disampaikan dalam pokok-

pokok pikiran DPRD cukup sulit. Hal ini dikarenakan biasanya pokok-pokok pikiran DPRD lebih berfokus pada area-area di Kebumen bagian selatan.

Tanggapan :

Langkah yang tepat yaitu dengan menyampaikan keluhan atau pengajuan perbaikan ke OPD terkait. Apabila pengajuan kepada OPD yang bersangkutan belum ada tindak lanjut, mungkin dapat dicoba secara politis dengan cara mengajukan melalui anggota DPRD yang berada di desa. Barangkali dapat dilakukan perbaikan dengan dana aspirasi dari wakil tersebut.

6. Kepala Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen

Di desa Kawedusan terdapat jalan kabupaten namun kondisi sudah berlubang cukup parah. Apakah dana darurat dan mendesak dapat digunakan untuk perbaikan jalan tersebut?

Kurangnya apresiasi dari BPKPD untuk desa yang sudah melunasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Desa Kawedusan sudah lunas PBB, namun saat acara Semarak 2024 yang diselenggarakan oleh BPKPD tidak memperoleh apresiasi apapun.

Tanggapan :

Dana darurat dan mendesak tidak dapat digunakan untuk perbaikan jalan karena termasuk kategori belanja tidak terduga. Belanja tersebut dilakukan manakala terjadi bencana dan bencana tersebut ditetapkan oleh bupati.

Berkaitan dengan apresiasi untuk desa perihal Satu Hari Lunas (SHL) akan dipertimbangkan kembali dan menjadi koreksi untuk BPKPD.

Sub Koordinator Perencanaan



Dedy Prayogi, S.E.

NIP 19880427 201101 1 005



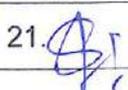
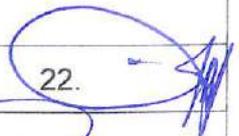
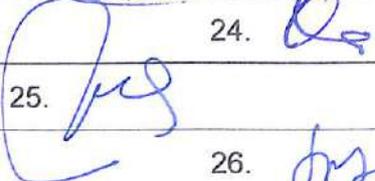
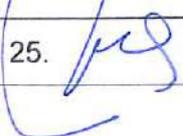
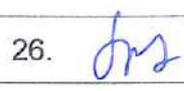
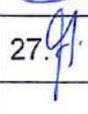
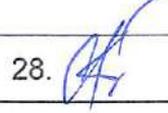
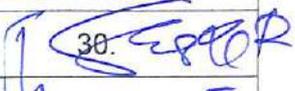
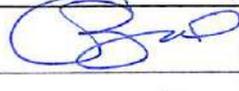
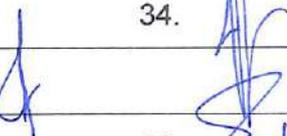
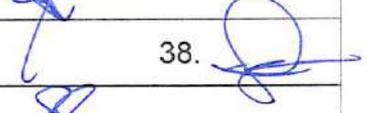
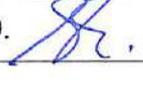
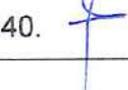
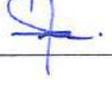
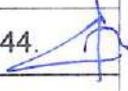
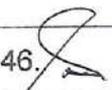
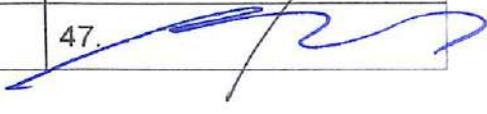
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

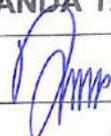
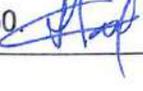
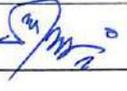
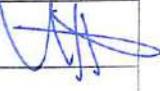
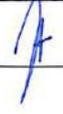
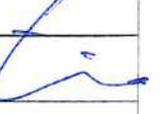
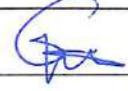
Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen Jalan Pahlawan
Nomor 2 Kebumen
Acara : Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	NAMA	INSTANSI	L	P	TANDA TANGAN
1	Aditya Dahmat S.	Forum Anak Kebum	✓		1.
2	Anahulu Abid. M. bin	UPB	✓		2.
3	Surono	PIZZA HUT	✓		3.
4	Bagus P	Kec. Kemaren	✓		4.
5	Amir M.	Kec. Rowokade			5.
6	SUGITO EP.	DISPARBUP			6.
7	Hanis S	BPKPD	✓		7.
8	Supriyanto	BPKPD			8.
9	Dwi Y	Itda			9.
10	Agus Fend. n	BPKPD	✓		10.
11	Riadi	BPKPD	L		11.
12	Agus F	Rowokade	✓		12.
13	M. Pr Sri Widasthi	Disdikpora	P		13.
14	E. R. PARILLAN	notaris	L		14.
15	Viado Hartanto	Beber	L		15.
16	SUGANDINI	BPKPD			16.
17					17.
18	Jamal Darmawati	BPKPD	L		18.
19	Pictul S	-	L		19.

NO	NAMA	INSTANSI	L	P	TANDA TANGAN
20	ARNI	BPKPD		✓	20. 
21	M. Supriyo	BPKPD		✓	21. 
22	Arman	BPKPD	✓		22. 
23	Genzawan	BPKPD	L		23. 
24	Haum		✓		24. 
25	Mulyadhar	Kec. Alang	L		25. 
26	Sunguda	Bag AP			26. 
27	Endah Widy	BPKPD			27. 
28	Aim L. Hafid	BPKPD			28. 
29	Santi W	Dinas PMD			29. 
30	Kusumowijayar	BPKPD			30. 
31	Masturida	Ditapang			31. 
32	Ehbra. W	BPKPD	L		32. 
33	ENDAH HENDRASMITA	Kec. Premun		P	33. 
34	Eca Fulkato	BPKPD	L		34. 
35	Dran A	--		P	35. 
36	Eny H	--			36. 
37	M. Syamsi				37. 
38	Faza Fauzan	--			38. 
39	Eho J	Bag PSDA			39. 
40	Yuniang	DLHKP		✓	40. 
41	Sri Wahyuni	BPKPD		✓	41. 
42	Raisa	Trio Hotel		✓	42. 
43	Lindad D	Pondok Loggell	✓		43. 
44	Andi	Korpos	L		44. 
45	Sulcar	BPKPD			45. 
46	Aris	BPKPD			46. 
47	MARA BUDI S	--			47. 

NO	NAMA	INSTANSI	L	P	TANDA TANGAN
48	Dedy Prayogi	BKPD	L		48. 
49	ANP Ginanjar				49. 
50	Pramono Surandito				50. 
51	Umi Marzuah				51. 
52	Tursiman				52. 
53	Warijan				53. 
54	M. Kusnaeni				54. 
55	Handiyanto				55. 
56	Imam Subekti				56. 
57	Erni Astuti	BPKPD		✓	57. 
58	Hany Fatmawati	BPKPD		✓	58. 
59	Agus Supriyanto				59. 
60	Dwi Nurrohman				60. 
61	Sotiro Pambudi	BPKPP			61. 
62	Khoerul Afanda				62. 
63	Israeni				63. 
64	Nawawi				64. 
65	Suwanto				65. 
66					66.
67					67.
68					68.
69					69.
70					70.

Sub Koordinator Perencanaan



Dedy Prayogi, S.E.
NIP. 19880427 201101 1 005

FOTO KEGIATAN FORUM OPD BPKPD KABUPATEN KEBUMEN





Form 8
Usulan APBN Non DAK Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Tujuan	Uraian Kegiatan	Keluaran		Lokasi	Lokasi Detail	APBD Provinsi	Keterangan
			Uraian	Volume				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

Kebumen, 20 Februari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Na
Dis. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001

Form 9

Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kab/Kota (Daerah)	Jenis Kegiatan	Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan		Permasalahan	Usulan Kegiatan	Sasaran		Keluaran		Lokasi	Usulan Anggaran			Ranking	Keterangan
					Jenis Bangunan	Volume			Uraian	Volume	Uraian	Volume		APBD Provinsi (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

NIHIL

Kebumen, 20 Februari 2024
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
 Penerimaan Daerah Kabupaten Kebumen



(Signature)
 Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740529 199303 1 001

